

**PENGARUH PENAGIHAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA BATU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

AKUNTANSI



Disusun Oleh :
YOHANA LISTRA
2018110005

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG
2022

ABSTRAK

Pematuhan undang-undang cukai negeri adalah penting untuk meningkatkan hasil negeri. Beberapa faktor mempengaruhi pematuhan, termasuk pengebilan, pemeriksaan dan sekatan cukai. Mengetahui secara parsial pengaruh penagihan, pemeriksaan dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu merupakan tujuan dari penelitian ini. Metode kuantitatif, jenis metode yang digunakan didalam penelitian . sampel 84 dan menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan sampel. Alat ukur yang digunakan sama. Regresi linier berganda, analisa data yang digunakan dengan program SPSS. Hasil penelitian mengatakan bahwa penagihan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, thitung = 3,419, pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, thitung = 4,796, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, nilai thitung = 5,342. Adapun yang perlu diperhatikan wajib pajak, adalah patuh dan membayar pajak tepat waktu.

Kata kunci: kepatuhan, pemeriksaan, pemungutan, sanksi perpajakan, wajib pajak

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi, mengingat kekayaan sejarah dan budaya, serta sumber daya alam dan penduduknya. Namun dalam prakteknya, Pemerintah Indonesia tidak mampu memanfaatkan peluang tersebut. Keadaan ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan bahwa ada banyak masalah di berbagai sektor. Ada penurunan ekonomi domestik karena penyakit coronavirus 2019 atau Covid-19. Dampak kesehatan ini memiliki implikasi yang luas tidak hanya untuk kesehatan manusia, tetapi untuk seluruh perekonomian. Hampir semua bisnis berada di bawah tekanan, dan masalah ini hanya akan bertambah buruk. Perpajakan dapat membantu meningkatkan perekonomian domestik dengan menyediakan sumber keuangan untuk pengeluaran pemerintah, yang dapat merangsang kegiatan ekonomi.

Dalam memenuhi keperluan negeri, kerajaan bergantung kepada dua sumber pembiayaan Yaitu sumber pembiayaan asing seperti pinjaman dan geran luar, dan sumber pembiayaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN (Anggaran Hasil dan Perbelanjaan Negara) seperti penjualan gas bumi dan penjualan nonmigas. Oleh karena itu, sumber hasil yang paling mungkin untuk negeri dalam negeri ialah cukai.

Menurut Indrihastuti, P & Amaniyah, M (2020), pajak adalah pembayaran wajib yang dikeluarkan oleh warga negara berdasarkan hukum yang berlaku. Cukai memberi kontribusi yang sangat penting, dan tanpa cukai, kehidupan tidak akan lancar.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan melalui perpajakan dilakukan dengan mengenakan pajak kepada sebanyak mungkin orang. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan dalam negeri adalah dengan mengenakan pajak. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima selama tahun pajak. Salah satu undang-undang yang mengatur tentang pajak penghasilan adalah Undang-Undang No.7 tahun 1983, terakhir dari undang-undang ini diubah pada tahun 1995 menjadi undang-undang No.36 tahun 2008. Ada dua cara berbeda untuk berpikir tentang pajak penghasilan: dari perspektif individu dan dari perspektif entitas. Pajak perusahaan lebih mudah diidentifikasi dan ditagih daripada pajak penghasilan pribadi (Purba, 2012). Kepatuhan Wajib Pajak adalah kemampuan dan keinginan untuk mematuhi undang-undang perpajakan. Kemampuan dan keinginan untuk membayar pajak bergantung pada berbagai kondisi yang ada di sekitar Wajib Pajak. (Suhendri, et.al, 2021).

Virus corona (covid19) menjadi kendala utama pencapaian penerimaan pajak di Kota Batu, karena pendapatan utama Dinas Pajak Pratama Kota Batu berasal dari pariwisata. Pajak tidak dibayar karena pandemi COVID-19, sehingga pemerintah memberlakukan pemungutan, pemeriksaan. Hukuman ini mengikat dan dapat ditegakkan. Oleh karena itu, dengan persetujuan DPR, pemerintah mengesahkan UU No.19/ 2008, pemungutan cukai dengan surat paksa.

Peneliti tertarik dengan KPP Pratama Kota Batu sebagai objek penelitian karena merupakan pusat pelayanan, konsultasi, dan pusat pemeriksaan pajak bagi wajib pajak di berbagai bidang perpajakan. Sesuai dengan latar belakang

diatas maka skripsi ini berjudul “Pengaruh Penagihan, Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Batu”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penagihan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Batu?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Batu?
3. Apakah sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Batu
2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Batu
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Batu

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis dan Akademis
 - a. Bagi Mahasiswa
memperluas wawasan mahasiswa, menerapkan apa yang telah mereka pelajari di universitas.
 - b. Bagi Universitas

Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak universitas dan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa lain untuk menambah wawasan dan menulis disertasinya.

c. Bagi Peneliti

Studi ini merupakan implementasi saya berdasarkan wawasan yang saya peroleh dari menulis skenario di universitas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu

memberikan evaluasi dan masukan bagaimana pengaruh pemungutan pajak.

b. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan pertimbangan masukan tambahan .

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilina, K. R., Made, A., & Dianawati, E. (2016). “Pengaruh Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Kepanjen”. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(2).
<https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/1361>
- Febriyanti, I. (2013). “Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan pajak dan Penagihan pajak terhadap Penerimaan Pajak (Pada kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan)”.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kpp Pratama Surabaya Sawahan”. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 124.
- Indrihastuti, Poppy., & Malimatul A. (2020). “Peran Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang”. *Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi dan Sosial, Optimal*. p-ISSN : 2549-239X e-ISSN : 2549-2705.
- Kardianti, E., Hidayat, M., & Pratiwi, T. S. (2018). “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kuala Tungkal”. *Jurnal Ekonomi Global Masa Kini*, 8(2).

Krisnayanti, N, K, Y., & Yuesti, A. (2019). "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak (pada KPP Denpasar Bali)". *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*.

Mardiasmo. 2016. "Perpajakan". Edisi Terbaru, Andi, Yogyakarta.

Primerdo, R. Y., & Aris, M. A. (2015). "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surakarta)"(Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Rahuyu, Siti Kurnia. 2010. "Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Sosial)". Cetakan Pertama, Graha Ilmu , Yogyakarta.

Suhendri, H., & Iriani, N. I. (2021). "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Sebelum Dan Saat Terjadi Pandemi Covid 19". *Referensi Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*.

Tonthawi, A. (2021). "Pengaruh Surat Tagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". *Jurnal Syntax Transformation* 2(8). <https://doi.org/10.46799/jst.v2i8.343> **E-ISSN:** 2721-2769

Wulandari, R. (2020). "Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel

Moderasi". *Journal of Business and Banking* (ISSN 2088-7841)

<https://scholar.archive.org/work/2gox4bncpjdxckbyzplw2wc5m/access/wayb>

[ack/ht](#)